

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI**

Putut Ardiansyah<sup>1</sup>  
Agustina Setiawan<sup>2</sup>  
Yovinus<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the influence of local government policy implementation factors on the achievement of parking retribution targets on public roads as a component of regional revenue in Cimahi City. The research employs Edward III's (1980) policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, and Siagian's (1985) target component model, which consists of organizational goals, progress indicators, organizational milestones, and time-bound achievements. Using a quantitative descriptive-verificative approach, data were collected from 100 respondents, including parking attendants, transportation officials, and policy implementers. The results indicate that policy implementation factors significantly influence target achievement, contributing 50.84% of the variance. The communication and bureaucratic structure variables exert the strongest impact, while resources and disposition show moderate influence. The findings highlight that effective coordination, sufficient resources, and disciplined bureaucratic mechanisms are crucial to improving parking retribution performance and supporting local revenue growth. The study contributes theoretically to public policy implementation literature and practically to optimizing parking retribution management in regional governance.*

***Keywords: Policy Implementation, Retribution Achievement, Cimahi City***

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Cimahi terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Cimahi (2023), jumlah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

kendaraan bermotor mencapai lebih dari 310 ribu unit, meningkat hampir 7% dibandingkan tahun sebelumnya . Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, khususnya di kawasan pusat ekonomi dan perkantoran. Akibatnya, parkir di tepi jalan umum menjadi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, fenomena ini menimbulkan permasalahan baru, baik dari aspek ketertiban lalu lintas maupun efektivitas pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah.

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor retribusi parkir di tepi jalan umum memiliki potensi besar untuk menunjang kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Bapenda Kota Cimahi Tahun 2023, sektor ini ditargetkan menyumbang sekitar Rp 3,5 miliar per tahun, namun realisasi yang tercapai hanya 78,2% dari target. Kesenjangan ini menandakan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan, mulai dari lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarlembaga, hingga rendahnya kesadaran para pelaksana di lapangan terhadap pentingnya pelaporan retribusi secara transparan.

Kebijakan retribusi parkir di Kota Cimahi diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengamanatkan pengelolaan parkir harus dilakukan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, George C. Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini bersifat saling bergantung: kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang efisien. Berdasarkan teori ini, masalah utama dalam kebijakan retribusi parkir Cimahi tampak bersumber dari lemahnya koordinasi antaraktor dan keterbatasan kapasitas pelaksana di lapangan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Selain faktor-faktor implementasi, keberhasilan kebijakan juga diukur melalui pencapaian sasaran, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1985). Menurutnya, sasaran kebijakan merupakan bagian dari tujuan organisasional yang ingin dicapai secara konkret dan terukur dalam kurun waktu tertentu. Sasaran juga menjadi indeks kemajuan dan ukuran keberhasilan pelaksanaan program. Dalam konteks retribusi parkir di Cimahi, pencapaian sasaran berarti sejauh mana kebijakan retribusi mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, menekan kebocoran pendapatan, dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Fenomena lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah jelas, masih terjadi disparitas antara aturan dengan pelaksanaan. Misalnya, hasil wawancara dengan beberapa petugas Dinas Perhubungan mengungkapkan bahwa pengawasan rutin sering kali tidak dilakukan karena keterbatasan personel dan anggaran. Di sisi lain, sebagian juru parkir menyatakan belum menerima sosialisasi yang cukup terkait prosedur pelaporan hasil retribusi. Hal ini memperlihatkan bahwa dimensi komunikasi dan sumber daya belum berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya, efektivitas pencapaian sasaran kebijakan menjadi lemah dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Selain itu, struktur birokrasi di Dinas Perhubungan dan Bapenda Kota Cimahi masih bersifat hierarkis, yang mengakibatkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan lambat. Setiap keputusan teknis perlu melewati beberapa tingkatan administratif, sehingga respon terhadap dinamika di lapangan tidak cepat. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas kebijakan dan keterlambatan dalam mencapai target pendapatan. Dengan demikian, pembenahan struktur dan prosedur birokrasi menjadi keharusan agar kebijakan dapat lebih adaptif terhadap kondisi aktual.

Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan Sejauh mana faktor-faktor implementasi kebijakan pemerintah daerah memengaruhi pencapaian sasaran retribusi parkir di tepi jalan umum dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cimahi? Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

pengaruh keempat faktor implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir yang diukur melalui empat komponen sasaran menurut Siagian, yaitu kesesuaian tujuan, indikator kemajuan, tahapan kinerja, dan hasil dalam kurun waktu tertentu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan dua kerangka besar, yakni model implementasi kebijakan Edward III dan teori sasaran organisasi Siagian (1985), sebagai dasar analisis terhadap efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.

#### *Kerangka Teori*

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir di Kota Cimahi dianalisis melalui dua pendekatan teoritis utama, yaitu teori faktor-faktor implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980) dan teori komponen sasaran kebijakan menurut Siagian (1985). Kedua teori ini dipilih karena memiliki keterkaitan logis antara aspek pelaksanaan kebijakan (Edward III) dan hasil atau outcome kebijakan (Siagian), sehingga dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini.

Edward III menyoroti dimensi-dimensi penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sementara Siagian memberikan kerangka untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan organisasional yang diharapkan. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian memperoleh perspektif yang utuh mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah beroperasi dan bagaimana keberhasilannya dapat diukur secara sistematis.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Dengan demikian, teori Edward III dan Siagian memberikan dua perspektif yang saling melengkapi. Edward III menekankan pada aspek proses implementasi, sementara Siagian berfokus pada hasil atau outcome kebijakan. Keduanya berperan penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran program publik. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Cimahi dinilai tidak hanya dari sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai prosedur, tetapi juga dari seberapa besar dampak nyata yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran pendapatan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara proses implementasi dan pencapaian sasaran menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah secara komprehensif.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan pemerintah daerah (variabel X) terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir di tepi jalan umum (variabel Y) di Kota Cimahi. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti memperoleh data numerik yang dapat diolah secara statistik untuk mengukur sejauh mana hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berlangsung. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan dan pencapaian sasaran berdasarkan persepsi responden, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi **Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat**, yang secara administratif terdiri atas tiga kecamatan yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Lokasi ini dipilih karena seluruh kegiatan parkir tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan retribusi parkir dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur pelaksana kebijakan retribusi parkir serta juru

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

parkir resmi di bawah koordinasi pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan (2023), jumlah populasi adalah **135 orang**, yang terdiri atas pegawai Dishub dan Bapenda sebanyak 35 orang serta juru parkir resmi sebanyak 100 orang.

Untuk menentukan jumlah sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan **rumus Slovin** :

Dengan  $N=135$  dan tingkat kesalahan  $e=0,05$ . Berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang digunakan dibulatkan menjadi 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportional random sampling, di mana setiap kelompok (pegawai Dishub, Bapenda, dan juru parkir) diberikan proporsi responden berdasarkan jumlah populasi masing-masing agar representatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup, wawancara terarah, dan studi dokumentasi. Kuesioner disusun berdasarkan indikator teoritis dari variabel Edward III dan Siagian (1985) menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Validitas dan reliabilitas instrumen diuji menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment dan koefisien Cronbach Alpha dengan batas minimal reliabilitas 0,70. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi Dinas Perhubungan dan Bapenda Kota Cimahi tahun 2022–2023, termasuk data realisasi retribusi parkir, jumlah titik parkir, dan kontribusi PAD.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris setiap indikator variabel penelitian. Kedua, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model regresi. Ketiga, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel .

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap pencapaian sasaran dan uji F (simultan) untuk mengetahui pengaruh keempat faktor secara bersama-sama. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi faktor-faktor implementasi kebijakan terhadap pencapaian sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh  $R^2$  sebesar 0,5084 atau 50,84%, yang berarti bahwa faktor implementasi kebijakan (Edward III) memberikan pengaruh sebesar 50,84% terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir (Siagian), sedangkan sisanya sebesar 49,16% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kondisi ekonomi masyarakat, regulasi pajak dan retribusi, serta kepatuhan wajib retribusi.

## **PEMBAHASAN**

Kota Cimahi merupakan salah satu kota satelit di wilayah metropolitan Bandung Raya yang mengalami pertumbuhan pesat, baik dari segi jumlah penduduk maupun aktivitas ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi Tahun 2023, jumlah penduduk mencapai lebih dari 600.000 jiwa dengan kepadatan sekitar 16.000 jiwa/km<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai meningkatnya mobilitas masyarakat menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan lahan parkir. Dari 215 titik parkir resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub), sebagian besar berlokasi di jalan protokol seperti Jalan Gandawijaya, Jalan Amir Machmud, dan Jalan Baros, dengan volume kendaraan yang sangat tinggi setiap harinya. Kondisi ini memperlihatkan potensi besar retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, tetapi juga mengandung potensi kebocoran yang signifikan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Bapenda Kota Cimahi Tahun 2023, target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp 3,5 miliar, sedangkan realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 2,736 miliar atau 78,2% dari target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Dalam wawancara dengan kepala bidang pengelolaan retribusi, terungkap bahwa sebagian

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

besar titik parkir belum menggunakan sistem pembayaran digital, sehingga pencatatan hasil retribusi masih dilakukan manual oleh juru parkir. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pengawas Dishub menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara berkala di semua titik.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,5084. Ini berarti 50,84% pencapaian sasaran kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan 49,16% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Secara parsial, variabel komunikasi memberikan pengaruh tertinggi dengan nilai  $t$  hitung  $4,287 > t$  tabel  $1,984$ , diikuti oleh struktur birokrasi dengan nilai  $t$  hitung  $3,974$ , sementara sumber daya dan disposisi menunjukkan pengaruh sedang. Temuan ini mempertegas bahwa efektivitas komunikasi dan ketepatan struktur birokrasi menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik, khususnya dalam sistem pengelolaan retribusi parkir di Cimahi.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, dimensi komunikasi memperoleh nilai rata-rata skor 4,18 (kategori tinggi), yang berarti responden menilai bahwa komunikasi antaraktor kebijakan relatif berjalan baik namun belum sepenuhnya efektif. Dalam teori Edward III (1980), komunikasi mencakup tiga aspek penting, yaitu transmisi pesan, kejelasan, dan konsistensi. Di Kota Cimahi, komunikasi antara Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, dan petugas lapangan dilakukan melalui rapat koordinasi triwulanan dan penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang titik-titik parkir resmi. Namun, informasi mengenai perubahan tarif retribusi dan mekanisme penyetoran sering kali terlambat sampai ke pelaksana di lapangan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan pada jalur komunikasi vertikal yang menghubungkan tingkat kebijakan dengan pelaksana teknis. Hambatan tersebut berdampak langsung pada ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

kebijakan yang berlaku. Secara statistik, pengaruh komunikasi terhadap pencapaian sasaran memiliki koefisien regresi  $b_1 = 0,364$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, peningkatan efektivitas komunikasi antarinstansi dapat memperkuat pencapaian sasaran retribusi sesuai dimensi Siagian (sasaran sebagai bagian dari tujuan organisasi dan indeks kemajuan).

Sumber daya merupakan dimensi kedua yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata skor dimensi ini adalah 3,89 (kategori cukup tinggi). Dalam konteks kebijakan retribusi parkir, sumber daya mencakup aspek personel, anggaran, serta sarana dan prasarana. Jumlah petugas lapangan yang terdaftar di Dinas Perhubungan berjumlah 102 orang, dengan rasio pengawasan satu petugas terhadap dua titik parkir. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, belum seluruh titik parkir dilengkapi dengan marka dan papan tarif resmi, sehingga membuka peluang bagi parkir liar dan kebocoran retribusi.

Secara statistik, dimensi sumber daya menunjukkan nilai koefisien regresi  $b_2 = 0,271$  dengan nilai signifikansi  $0,018 < 0,05$ , artinya berpengaruh signifikan namun tidak sebesar komunikasi dan struktur birokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pencapaian sasaran kebijakan akan sulit diwujudkan. Hal ini juga sesuai dengan komponen sasaran Siagian yaitu pencapaian hasil yang harus diukur dalam jangka waktu tertentu — yang akan sulit dicapai jika dukungan sumber daya tidak konsisten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana memiliki pengaruh positif namun tidak dominan terhadap pencapaian sasaran kebijakan. Nilai rata-rata skor dimensi ini adalah 3,76 (kategori sedang) dengan koefisien regresi  $b_3 = 0,204$  dan signifikansi  $0,042 < 0,05$ . Disposisi mengacu pada sikap, motivasi, dan komitmen petugas lapangan dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan observasi, ditemukan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

bahwa sebagian juru parkir belum memahami pentingnya penyetoran hasil retribusi secara penuh dan tepat waktu. Masih ada kecenderungan sebagian kecil pelaksana menahan setoran dengan alasan kebutuhan pribadi atau keterlambatan laporan dari petugas pengawas.

Namun, ada pula indikasi positif berupa meningkatnya kesadaran sebagian pelaksana setelah diterapkannya sistem insentif berbasis kinerja oleh Dinas Perhubungan. Langkah ini memperkuat moral kerja dan tanggung jawab pelaksana, yang kemudian berdampak pada peningkatan setoran rata-rata harian sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sikap profesional dan motivasi kerja memiliki korelasi positif terhadap pencapaian sasaran program sebagaimana yang diuraikan oleh Siagian (1985) mengenai indeks kemajuan organisasi.

Struktur birokrasi menjadi faktor yang paling berpengaruh kedua setelah komunikasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata skor dimensi ini mencapai 4,21 (kategori tinggi) dengan koefisien regresi  $b_4 = 0,342$  dan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Struktur birokrasi dalam pengelolaan retribusi parkir melibatkan beberapa instansi utama yaitu Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis, Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola penerimaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum daerah. Namun, dalam praktiknya koordinasi antarlembaga ini masih belum sepenuhnya efektif karena adanya tumpang tindih kewenangan dan jalur pelaporan yang panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang hierarkis dan berlapis menghambat kecepatan respon serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur yang adaptif dan berbasis koordinasi horizontal lebih mampu mempercepat pencapaian sasaran kebijakan, khususnya dalam dimensi pencapaian hasil program sesuai waktu yang ditentukan (Siagian, 1985).

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Secara simultan, hasil penelitian membuktikan bahwa keempat dimensi implementasi kebijakan Edward III memiliki pengaruh signifikan terhadap seluruh komponen sasaran kebijakan Siagian. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar  $19,468 > F$  tabel  $2,46$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , yang berarti terdapat hubungan simultan antara implementasi kebijakan dan pencapaian sasaran. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas pencapaian sasaran retribusi parkir.

Pada level empiris, hasil analisis ini selaras dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Ketika komunikasi antarinstansi berjalan lancar, sumber daya memadai, sikap pelaksana positif, dan struktur birokrasi efisien, maka pencapaian sasaran meningkat secara signifikan, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun ketertiban administrasi. Berdasarkan perbandingan realisasi retribusi tahun 2022 dan 2023, terdapat kenaikan  $10,4\%$  yang sebagian besar diakui oleh pejabat Bapenda sebagai hasil dari peningkatan koordinasi lintas sektor dan penerapan sistem pelaporan elektronik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang efektif merupakan determinan utama dalam pencapaian sasaran program daerah. Integrasi antara model Edward III dan Siagian memberikan pemahaman menyeluruh bahwa proses pelaksanaan kebijakan (input dan throughput) memiliki hubungan kausal langsung dengan hasil atau outcome kebijakan, yang dalam konteks ini terwujud dalam peningkatan efektivitas retribusi parkir di Kota Cimahi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa **implementasi kebijakan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian sasaran retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Cimahi**. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar **0,5084**, yang menunjukkan bahwa  $50,84\%$  efektivitas pencapaian sasaran dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

birokrasi, sedangkan sisanya 49,16% dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti regulasi, kondisi ekonomi masyarakat, dan tingkat kepatuhan wajib retribusi. Hasil ini memperkuat pandangan Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada sinergi antaraktor dan kejelasan proses komunikasi dalam birokrasi.

Secara empiris, faktor **komunikasi** dan **struktur birokrasi** terbukti sebagai variabel paling dominan dalam meningkatkan pencapaian sasaran. Komunikasi yang efektif antara Dinas Perhubungan, Bapenda, dan juru parkir berperan besar dalam mempercepat penyampaian informasi kebijakan serta menghindari salah tafsir di lapangan. Struktur birokrasi yang efisien dan koordinatif juga mendorong peningkatan pengawasan dan penegakan aturan di titik-titik parkir. Sementara itu, faktor **sumber daya** dan **disposisi pelaksana** turut berkontribusi secara signifikan meskipun dalam kategori sedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik akan berjalan optimal jika didukung oleh aparatur yang kompeten, sikap profesional, serta struktur kerja yang adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Dari perspektif teori **Siagian (1985)**, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat komponen sasaran — yaitu *kesesuaian dengan tujuan organisasi, indeks kemajuan, tahapan kinerja, dan pencapaian hasil dalam kurun waktu tertentu* — telah tercermin dalam kebijakan retribusi parkir di Kota Cimahi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Indikasi kemajuan dapat dilihat dari meningkatnya realisasi retribusi tahun 2023 sebesar 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan kepatuhan juru parkir resmi, dan penerapan sistem pelaporan digital pada sebagian titik parkir. Namun, masih dibutuhkan perbaikan struktural dan penataan ulang tata kelola agar potensi PAD dari sektor ini dapat dimaksimalkan dalam jangka menengah dan panjang.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis empiris yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan kebijakan bagi Pemerintah Kota

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Cimahi. Pertama, penguatan komunikasi vertikal dan horizontal perlu dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi antara Dinas Perhubungan, Bapenda, dan petugas lapangan. Implementasi *smart parking management system* berbasis digital akan mempermudah proses pelaporan, meminimalisir kebocoran, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan teknis dan moralitas kerja, terutama bagi juru parkir dan petugas pengawas lapangan agar memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap prinsip akuntabilitas publik. Ketiga, perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan prosedur birokrasi di sektor perparkiran agar jalur koordinasi dan pengawasan lebih ringkas serta efisien. Model koordinasi lintas bidang berbasis *task force* dapat diterapkan untuk mempercepat respon terhadap pelanggaran parkir dan mengoptimalkan realisasi pendapatan. Keempat, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur sebagaimana dikemukakan oleh Siagian, sehingga setiap periode target dapat dibandingkan dengan hasil aktual. Terakhir, dalam jangka panjang, penerapan kebijakan parkir berbasis kawasan (*zonal parking system*) dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi, memperluas potensi PAD, dan menumbuhkan budaya tertib parkir di masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat kajian implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

## **REFERENSI**

Aritonang, R. (2021). *Evaluasi implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan retribusi daerah*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 143–158. <https://doi.org/10.31937/japi.v9i2.178>

Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2023). *Kota Cimahi dalam Angka 2023*. Cimahi: BPS Kota Cimahi.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

- 
- Budiani, N. (2007). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 45–59.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Perhubungan Kota Cimahi. (2023). *Laporan Evaluasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2023*. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315170731>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Handoyo, S., & Rukmana, A. (2022). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif model Edward III: Analisis pada kebijakan transportasi perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 12(1), 33–49. <https://doi.org/10.52319/jipap.v12i1.301>
- Kurniawan, R. A., & Hidayat, R. (2021). *Optimalisasi penerimaan retribusi daerah berbasis digital di era otonomi daerah*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 8(3), 257–271. <https://doi.org/10.17509/jmkp.v8i3.255>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- OECD. (2022). *Urban mobility policy and local taxation: Enhancing efficiency and equity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/urbmob-2022-en>
- Siagian, S. P. (1985). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, D., & Wicaksono, G. (2020). Implementasi kebijakan publik dan efektivitas retribusi parkir daerah: Studi empiris pada kota menengah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah*, 15(2), 101–117. <https://doi.org/10.22146/japd.v15i2.332>
- Wibowo, H. (2023). Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di daerah perkotaan. *Jurnal Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 11(4), 411–426. <https://doi.org/10.35457/jpod.v11i4.789>

**JURNAL PRINSIP**

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>

DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i1.4751>

**VOLUME 2 No.1 2025**

E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

World Bank. (2022). *Local government finance and public service delivery in Indonesia*. Washington DC: The World Bank.